

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melaksanakan kontestasi politik pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2015. Pengusulan pasangan calon berdasarkan peraturan mengenai pemilihan kepala daerah, calon gubernur, bupati, dan walikota diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memenuhi perolehan minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.¹

Kota Surabaya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 akan menentukan walikota hingga lima tahun kedepan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pastinya dapat berpartisipasi untuk mengusung calon kepala dan wakil kepala daerah. Apalagi PDIP merupakan partai pemenang suara pemilu legislatif di Surabaya tahun 2014. Kemenangan suara mulai dari tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Surabaya.²

Pada Pilkada Surabaya 2010, PDIP mengusung pasangan Risma dan Bambang DH. Risma pada awalnya menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Kota Suabaya. Risma diusung atas rekomendasi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pastinya kondisi tersebut membuat akhirnya walikota perempuan pertama Surabaya ini masuk menjadi kader PDIP saat itu. Sedangkan Bambang DH adalah Walikota Surabaya selama tahun 2002—2005 dan 2005—2010 (dua periode). Maka dari itu Bambang DH tidak lagi bisa menjabat sebagai walikota. PDIP merekomendasikan pasangan tersebut sebagai hasil keputusan pengurus pusat. Sehingga setiap pengurus di Dewan Perwakilan Cabang (DPC)

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

² Rois Jajeli, "Suara PDIP Kuasai Kota Surabaya", diakses 17 Maret 2019, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-2562498/suara-pdip-kuasai-kota-surabaya>.

PDIP Surabaya dan setiap ratingnya haruslah memenangkan pasangan tersebut. Pada akhirnya, usaha tersebut menghasilkan kemenangan Risma-Bambang yang unggul hingga 8.505 suara dibandingkan dengan Arif Afandi dan Anis Kadir. Dan dari kemenangan itulah Risma dan Bambang DH memimpin Surabaya dari tahun 2010—2015.

Banyak penghargaan yang Tri Rismaharini dapat selama menjabat sebagai walikota Surabaya periode 2010-2015. Peranan Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya dalam periode pemerintahannya, membawakan Kota Surabaya mengarah menjadi *Smart City*. Dimensi dalam *Smart City* yang telah diterapkan oleh Risma di kota Surabaya adalah *Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Living, Smart People dan Smart Mobility*. Meskipun memang penghargaan yang berhasil dimenangkan oleh Surabaya dalam dimensi *Smart City* pada ajang penghargaan *Warta Ekonomi* tahun 2011 hanya pada *Smart Government, Smart Living, dan Smart Environment*. Dan masyarakat Surabaya mengakui Risma adalah walikota yang terbaik, dibuktikan dengan penghargaan wali kota terbaik ketiga dunia versi *World Mayor Project* pada tahun 2014, dan walikota terbaik dunia oleh *The City Mayor Foundation*.³

Kemudian menurut Asfar, tingkat kepuasan masyarakat Surabaya terhadap pemerintahan periode pertama Risma sudah mencapai 70%. Masyarakat sangat puas dengan kinerja Pemerintah Kota dalam penataan kota seperti program penghijauan, program dalam bidang kesehatan, dan pendidikan juga.⁴ Fakta tersebut juga didukung hasil survei kinerja walikota Surabaya oleh Laboratorium Ilmu Politik dan Rekayasa Kebijakan FISIP Universitas Brawijaya yang menyebutkan sebanyak 57,3% masyarakat Surabaya menilai kinerja Risma sudah baik. Tetapi memang juga ada survei yang menyebutkan sebanyak 21,8% menilai kinerja Risma sedang dan 17,9% menilai kinerja Risma buruk. Faktor itu juga dikarenakan adanya kinerja pemerintah kota Surabaya yang kurang merata.

³ Ervina Pitasari, *Kisah, Perjuangan, & Inspirasi Tri Rismaharini* (Yogyakarta: Checklist, 2018)

⁴ Edwin Fajerial, "Elektabilitas Risma-Whisnu di Atas 60 Persen", diakses 26 Maret 2019, <https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/692826/elektabilitas-risma-whisnu-di-atas-60-persen>.

Penilaian masyarakat Surabaya 99% baik untuk pertamanan, 93% baik untuk pelayanan kesehatan, 92% baik untuk inovasi memudahkan masyarakat dengan bantuan Bosda dan rapor online. Kemudian masyarakat Surabaya menilai baik sebanyak 86% untuk single window, e-musrenbag, dan media center, 85% mengatakan baik untuk kinerja Risma dalam bidang ekonomi serta perdagangan, dan 87% menilai baik kinerja Risma dalam bidang agama yaitu dengan penutupan lokalisasi Dolly.⁵

Meskipun kinerja Risma selama menjabat Walikota tergolong baik berdasarkan data tersebut. Tetapi tidak dipungkiri juga bahwa terdapat suara-suara pendukung partai internal PDIP yang tidak ingin mengukung Risma.

Fakta yang pertama muncul dari pernyataan Bambang DH bahwa pimpinan partai tingkat cabang dan daerah merasakan betul masalah tersebut saat Risma menjabat sebagai walikota Surabaya yaitu Risma tidak menjalankan kemandirian koordinasi tiga pilar. Risma dianggap langsung bypass lapor ke DPP.⁶

Sedangkan pernyataan dari Bambang DH terkait dengan keputusan tidak mengukung Risma dibantah oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya pernyataan personal bukan keputusan partai. Justru menurut Hasto, kepemimpinan Risma di Surabaya banyak memberikan terobosan baru. Bahkan warga Surabaya senang dengan kebijakan-kebijakan selama kepemimpinan Risma. Sehingga dari alasan tersebut, Hasto menyatakan bahwa beliau tidak menemukan alasan untuk pihak PDI Perjuangan tidak mengukung lagi Risma menjadi calon wali kota Surabaya periode 2015.⁷

⁵ Rr Laeny Sulistyawati, "Penilaian Masyarakat Surabaya terhadap Kinerja Risma", diakses 26 Maret 2019, <https://m.republika.co.id/berita/nasional/jawa-timur/14/03/02/n1t2nc-penilaian-masyarakat-surabaya-terhadap-kinerja-risma>.

⁶ Agita Suka Listyanti, "Kecewa, PDIP Malas Sokong Risma Maju Lagi," diakses 24 September 2020, <https://nasional.tempo.co/read/604625/kecewa-pdip-malas-sokong-risma-maju-lagi>

⁷ Indra Akuntono, "DPP PDI-Perjuangan Sebut Risma Tetap Dicalonkan dalam Pilwalkot Surabaya 2015," diakses 24 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2014/09/04/16262581/DPP.PDI-P.Sebut.Risma.Tetap.Dicalonkan.Dalam.Pilwalkot.Surabaya.2015>

Terdapat fakta, berdasarkan pernyataan ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP tidak ingin mengusung Risma menjadi calon walikota, karena Risma dianggap tidak banyak berkontribusi di dalam partai. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Ketua Fraksi DPRD Surabaya, Sukadar. Dia menyatakan bahwa sebagian besar pengurus cabang tidak ingin mengusung Risma karena Risma tidak pernah berkontribusi untuk partai.⁸ Sikap Risma yang seperti ini memang ada hubungannya dengan latar belakang Risma yang seorang birokrat. Beliau pernah menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai politik dan yang beliau tahu adalah bekerja untuk rakyat.⁹ Apalagi Risma sendiri merasa bahwa dirinya banyak mendapatkan tekanan dalam menjalankan setiap kebijakannya, dimana tekanan itu salah satunya juga berasal dari politisi di internal partainya sendiri.¹⁰

Kemudian Budi Leksono Bendahara PDIP Surabaya juga menyampaikan bahwa hasil rapat kerja cabang pada 15 Maret 2015, seluruh rating sepakat untuk tidak lagi mengusung Risma. Mereka memutuskan untuk mengajukan Wisnu Sakti Buana yang asli kader partai secara aklamasi.¹¹

Selain itu ada juga informasi bahwa Risma lebih sering terlihat tampil dengan kader partai selainnya. Risma dianggap meninggalkan teman-teman kader PDIP yang sedang memperjuangkan amanah yang dititipkan oleh rakyat pada mereka.¹² Memang pada saat Risma mempermasalahkan pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai wakil walikota Surabaya, Risma berkeluh kesah atau curhat kepada politisi partai lain dan pejabat negara terkait dengan masalah tersebut. Hal

⁸. Agita Sukma Listyanti, "Duh, PDIP Isyaratkan Tak Calonkan Lagi Wali Kota Risma," diakses 24 Mei 2019, <https://nasional.tempo.co/read/649610/duh-pdip-isyaratkan-tak-calonkan-lagi-wali-kota-risma/full&view=ok>.

⁹. Abdul Hakim dan Didik Prasetyono, *Merajut Kemelut Risma, PDI Perjuangan Dan Pilkada Surabaya* (Lamongan: Pagan Press, 2016), 9.

¹⁰. Ibid, 3.

¹¹. Agita Sukma Listyanti, "PDIP Tetap Tak Mau Usung Risma Lagi sebagai Wali Kota," diakses 15 Mei 2020, <https://nasional.tempo.co/amp/654527/pdip-tetap-tak-mau-usung-risma-lagi-sebagai-wali-kota>.

¹². Ahmad Zaimul Haq, "Ini Alasan PDIP Surabaya Tidak Lagi Mengusung Risma Maju Cawali Surabaya," diakses 24 Mei 2019, <http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/ini-alasan-pdip-surabaya-tidak-lagi-mengusung-risma-maju-cawali-surabaya>.

itu ditunjukkan dengan pernyataan Puan Maharini sebagai salah satu ketua DPP PDI Perjuangan “Sebagai keluarga besar PDI-P, harusnya (Risma) mawas diri, harus bisa menjaga ambisi dan emosi, jangan memperkeruh suasana lari kanan kiri. Boleh berkeluh kesah sebagai manusia, lebih baik tidak memperkeruh suasana.” Bahkan sampai Puan juga menunjukkan rasa syukurnya jika memang kada kader PDI-P mumpuni yang dibajak partai lain. Dan Puan mengembalikan semuanya kepada masing-masing, lebih cocok ke mana.¹³

Syaifudin Sekretaris DPC PDIP Surabaya selama pemerintah kota dipegang Tri Rismaharini, program-program kerja pemerintah kota sebelumnya yang menjadi kebanggaan kota Surabaya tidak bisa dilanjutkan dengan baik oleh Risma. Seperti contoh persoalan pelayanan kesehatan dan anggaran kesehatan bagi warga tidak mampu yang menjadi permasalahan berkepanjangan.¹⁴

Kemudian persoalan pendidikan adalah terkait surat keterangan warga tidak mampu dipersulit. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang harusnya dikeluarkan Rukun Tetangga/Rukun Warga diubah menjadi dikeluarkan dari pihak sekolah. Padahal, institusi pendidikan tidak punya kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, persoalan banjir yang semakin meluas, banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota yang hilang, selain juga terjadinya nilai investasi yang turun di kota Surabaya. Sehingga DPC PDIP sebenarnya hanya ingin mengajukan Wisnu Sakti Buana untuk menjadi calon walikota Surabaya.¹⁵

Berdasarkan penelitian dari Ali Sahab, terkait dengan program penanganan banjir di Surabaya, responden menilai Risma sukses karena genangan air sudah tidak begitu lama. Survei masa menunjukkan penilaian kesuksesan

¹³. Carlos KY Paath, “Puan Bersyukur Bila Risma ‘Dibajak’ Partai Lain,” diakses 21 September 2020, <https://www.beritasatu.com/amp/fasial-maliki-baskoro/nasional/167855/puan-bersyukur-bila-risma-dibajak-partai-lain>.

¹⁴. Ahmad Zaimul Haq, “Ini Alasan PDIP Surabaya Tidak Lagi Mengusung Risma Maju Cawali Surabaya,” diakses 24 Mei 2019, <http://surabaya.tribunnews.com/2015/03/23/ini-alasan-pdip-surabaya-tidak-lagi-mengusung-risma-maju-cawali-surabaya>.

¹⁵. Ibid.

sebesar 10% dan survei dari *opinion leader* sebesar 9,8%. Risma merevitalisasi dengan menggunakan box culvert sehingga genangan air tidak terlalu lama. Faktanya saat hujan pada 19 Januari 2015 hujan terjadi selama 4 jam dan banjir terjadi secara merata di seluruh wilayah Surabaya. Sehingga memang kurang maksimal tetapi bisa mengurangi waktu genangan air. Kemudian jika dilihat dari penyerapan anggaran untuk program penanganan banjir sebesar 84,41% dari total anggaran sebesar Rp450.077.720.147. Rehabilitasi saluran drainase menyerap alokasi dana paling besar sebanyak Rp227.357.487.961 yaitu terserap sebesar 82,37%. Sehingga sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi dalam supaya bisa menangani secara menyeluruh daerah rawan banjir.¹⁶

Perbedaan mulai terjadi di tahun 2014 yaitu saat Bambang DH menyampaikan bahwa Risma tidak akan diusung lagi dengan segala kekurangan yang disoroti oleh Bambang DH dan para kader PDI Perjuangan di Surabaya. Tetapi DPP PDI Perjuangan memiliki pandangan yang berbeda terhadap Tri Rismaharini. DPP menganggap Risma layak untuk dicalonkan kembali menjadi walikota Surabaya dari PDI Perjuangan dengan segala prestasi dan karyanya untuk masyarakat.

Dari fenomena tersebut, peneliti melihat bahwa dalam Pilwali 2015, terjadi konflik internal dalam PDIP yang ada di Surabaya yang inginnya adalah Risma tidak dicalonkan untuk bisa memimpin Surabaya periode kedua. Meskipun memang pada akhirnya internal DPC PDIP Surabaya sepakat karena putusan pimpinan pusat. Tetapi tidak menghilangkan konflik yang terjadi antara Risma dengan kader PDIP DPC yang selainnya.

Kemenaarikan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pandangan antara DPP PDI Perjuangan dan DPC PDI Perjuangan Surabaya dalam memandang Tri Rismaharini terkait dengan pengusungan kembali di Pilkada Surabaya 2015 sebelum turunnya rekomendasi. Kondisi konflik tersebut

¹⁶. Ali Sahab, "Realitas Citra Politik Tri Rismaharini," *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 30, no. 01 (2017): 8–9.

kecenderungan mengarah pada pemahaman siapa yang lebih layak untuk dicalonkan menjadi kepala daerah, apakah kader ataukah non kader. Dan konflik terkait dengan pengusungan calon kepala daerah Surabaya sudah terjadi untuk kedua kalinya yaitu pada tahun 2010 dan saat 2015.

Padahal seharusnya dalam suatu organisasi partai khususnya kader dan pengurus dari tingkat bawah hingga ke atas bisa memiliki pemahaman yang sama karena kesamaan ideologi yang ada di PDI Perjuangan. Perbedaan pandangan ini menjadi tidak wajar karena terjadi hingga dua kali berturut-turut. Meskipun memang pada akhirnya seluruh kader PDI Perjuangan tunduk patuh dengan keputusan Ketua Umum yaitu Megawati Soekarno Putri tetapi ini dapat menjadi celah bagi lawan PDI Perjuangan untuk memecah belah PDI Perjuangan. Karena jika hal tersebut sampai terjadi maka berpotensi melemahkan PDI Perjuangan di daerah. Sehingga hal tersebut pastinya akan mengganggu jalannya PDI Perjuangan untuk mencapai visi misi yang diharapkannya.

Penelitian ini harapannya kajian mengenai sumber dari munculnya suatu konflik, bagaimana dinamika konfliknya, upaya penyelesaiannya dan efek dari penyelesaian. Sehingga dapat diketahui dinamika konflik politik internal partai khususnya PDIP yang mewakili rakyat dalam memilih pasangan calon untuk kepala daerah di Surabaya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti konflik internal PDIP yang terjadi sebelum pemilihan umum walikota Surabaya 2015.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan sejenis dengan tema yang akan diteliti yaitu suatu penelitian skripsi yang berjudul “Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan): Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013.” Skripsi tersebut juga membahas mengenai konflik internal yang terjadi di PDI Perjuangan Malang pada saat kandidasi pemilihan walikota dan wakil walikota Malang Tahun 2013.¹⁷

¹⁷. Stefany Debora, *Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Studi Kasus Kandidasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2013* (Skripsi—Universitas Airlangga, Surabaya, 2014).

Perbedaannya dengan penelitian ini fokusnya adalah PDI-Perjuangan Surabaya dan pada saat pra pemilihan kepala daerah Surabaya di tahun 2015.

Kemudian terkait dengan konflik internal partai, terdapat jurnal yang berjudul “Konflik Internal PDI Perjuangan Tahun 2005-2009”. Jurnal tersebut membahas mengenai konflik internal PDI Perjuangan berhubungan dengan kongres II PDI Perjuangan di Bali tahun 2005 dan dampak dari konflik internal partai tersebut hasil pemilu di tahun 2009.¹⁸ Sedangkan pada penelitian ini memang juga berhubungan dengan konflik internal PDI Perjuangan. Tetapi fokusnya konflik internal PDI Perjuangan pada saat sebelum pemilihan umum walikota Surabaya di tahun 2015.

“Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014” dimana konflik yang terjadi pada internal partai dan terjadinya saat pemilihan legislatif pada tahun 2014.¹⁹ Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini fokus kepada konflik internal PDI Perjuangan pada saat sebelum pemilihan umum kepala daerah Surabaya pada tahun 2015.

Terdapat juga jurnal penelitian yang berjudul “Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi”. Kesimpulannya penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam internal partai-partai politik akan berujung pada perpecahan dan kepengurusan ganda.²⁰ Kemudian juga sumber konflik kecenderungannya bukan karena perbedaan gagasan visi misi atau ideologi. Tetapi lebih pada pragmatisme politik atau kepentingan kekuasaan. Penelitian tersebut hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Karena dalam penelitian skripsi ini erat hubungannya dengan kekuasaan yaitu menjelang pemilihan walikota Surabaya periode selanjutnya. Perbedaannya terletak pada obyek yang sedang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan obyek penelitiannya adalah internal partai DPC PDIP pada tahun 2015.

¹⁸. Ahmas Faisol, Sunarlan dan IG. Krisnadi, “Konflik Internal PDI Perjuangan Tahun 2005-2009,” *Publika Budaya 01*, no.03 (2015): 1—9.

¹⁹. Yunicha Diana dan Robi Cahyadi Kurniawan, “Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014,” *Jurnal Wacana Politik 01*, no.01 (2016): 22—28.

²⁰. Lili Romli, “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi,” *Politica 08*, no. 2 (2017): 95—118.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika konflik internal PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon walikota di Surabaya tahun 2015?
2. Bagaimana resolusi konflik internal PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon walikota di Surabaya tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penyebab dan dinamika konflik internal PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon walikota di Surabaya tahun 2015.
2. Mengetahui resolusi konflik internal PDI Perjuangan dalam menentukan bakal calon walikota di Surabaya tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretik

Menambah kajian mengenai konflik politik dalam lingkup internal partai politik menjelang pemilihan kepala daerah beserta resolusi konfliknya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Salah satu referensi untuk penelitian mengenai konflik politik dalam lingkup internal partai politik.
- b. Memperluas cakrawala pengetahuan masyarakat awam mengenai dinamika konflik dalam lingkup internal partai politik.
- c. Mengambil pelajaran dari konflik internal PDI Perjuangan berhubungan dengan usaha penyolidan dan penyelesaian konflik internal organisasi.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Konflik Politik

Konflik politik adalah terjadinya kondisi perbedaan pendapat, pertentangan atau persaingan antar individu, kelompok, kelompok dengan individu, organisasi dengan individu atau organisasi dengan kelompok dalam usaha untuk mendapat dan atau mempertahankan sumber-sumber keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²¹

Suatu perbedaan dalam proses politik adalah hal yang wajar. Tetapi perbedaan akan berubah menjadi konflik jika sumber yang diperebutkan sama baik kekuasaan, kekayaan, kesempatan ataupun kehormatan. Kemudian konflik juga bisa terjadi jika sampai terjadi benturan kepentingan yang mana ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dan menyentuh titik kemarahan dari pihak selainnya.²²

Sehingga maksud dari konflik politik dalam penelitian ini adalah benturan kepentingan yang terjadi di internal PDI Perjuangan dimana ada pihak yang diperlakukan tidak adil dan menyentuh titik kemarahan dari pihak tertentu. Dan benturan kepentingan tersebut dalam rangka merebut atau mempertahankan sumber-sumber keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah.

1.5.2 Partai Politik

Partai politik menurut Carl Friendrich adalah sekelompok orang yang terorganisasi dengan stabil yang memiliki tujuan mempertahankan atau merebut kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada anggota-anggotanya. Sedangkan menurut Soltau partai politik adalah kesatuan politik yang sedikit banyak terorganisasikan dan memanfaatkan kekuasaan untuk bisa mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan yang

²¹. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 193.

²². Ibid, 194—195.

mereka harapkan. Kemudian Ramlan Surbakti menambahkan bahwa setiap partai politik dimanapun harus memiliki ideologi baik itu bersifat doktriner, pragmatis, atau jalan tengah keduanya. Sehingga Ramlan Surbakti merumuskan bahwa partai politik adalah kelompok dari kumpulan anggota yang terorganisasi dengan rapi dan stabi. Serta ideologinya menjadi landasan untuk persatuan dan motivasi dari partai politik tersebut. Dan usahanya adalah untuk mencari, merebut, dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui pemilihan umum sehingga dapat mewujudkan kebijakan umum yang sesuai dengan harapan mereka secara sah.²³

Sehingga partai politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sekelompok orang yang bersatu secara terorganisir dan memiliki tujuan untuk mempertahankan atau merebut kekuasaan dalam pemerintahan. Dan kekuasaan tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan umum sesuai dengan kepentingan anggota. Serta terdapat ideologi yang menjadi landasan persatuan dan motivasi perjuangan dari partai tersebut.

Banyak perspektif ilmuwan politik yang berbeda-beda dalam mendefinisikan partai politik. Perbedaan - perbedaan tersebut muncul dari latar belakang suatu partai politik terbentuk, tujuan dari adanya partai politik, serta peranan partai politik di dalam masyarakat dan negara. Setiap ilmuwan dalam mendefinisikan akan terikat dengan konteks yang melingkupi terkait dengan muncul atau adanya suatu partai politik.

Robert Huckshom mendefinisikan partai politik sebagai organisasi dari masyarakat suatu negara yang memiliki tujuan untuk mengajukan calon dan bersaing dalam pemilihan umum untuk bisa memiliki kendali atas kekuasaan pemerintahan dengan menguasai jabatan publik dan organisasi yang ada di pemerintahan.²⁴

²³. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 148—149.

²⁴. Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik* (Bandung: Nusa Media, 2015), 3—7.

Sejalan dengan Huckshom, Sigmund Neumann juga menyatakan bahwa partai politik merupakan suatu organisasi artikualitf yang anggotanya adalah pelaku politik aktif dengan memiliki tujuna untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk bisa mendapatkan dukungan rakyat dengan berbagai perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Suatu organisasi akan bisa mengendalikan pemerintah, dalam konteks demokrasi maka harus bisa memenangkan pemilihan umum, sehingga suatu partai politik akan bisa mewujudkan atau merealisasikan program-programnya melalui kader-kadernya. Karena kekuasaan yang didapat akan bisa dipergunakan untuk kontrol jalannya pemerintah sesuai dengan nilai-nilai yang diperjuangkan.²⁵

Tetapi ada juga partai politik yang muncul bukan dikarenakan untuk bisa memenangkan pemilu tetapi untuk memperjuangkan kepentingan atau aspirasi mereka. Sebenarnya suatu partai politik tetap akan terlibat dalam suatu kemenangan pemilu. Calon pemimpin atau perwakilan yang didukung dan dimenangkan dalam pemilu adalah mereka yang bisa memperjuangkan kepentingan yang diharapkan. Sehingga tidak pasti bahwa partai politik memiliki keinginan untuk memenangkan pemilu. Meskipun pada akhirnya jika suatu partai politik bisa memenangkan pemilu maka sebenarnya kepentingannya juga akan bisa terwujud dengan kedudukan atau jabatan yang dimiliki.

Dan memang setiap partai politik yang ada di Surabaya termasuk Indonesia secara nasional, partai politik ada untuk bisa memenangkan suatu pemilihan umum dalam pesta demokrasi. Kemenangan dalam suatu pemilihan umum tersebut akan bisa membuat mereka mampu mewujudkan kepentingan dan nilai yang diperjuangkan. Karena memang pada dasarnya setiap partai politik memiliki nilai-nilai dan kepentingan kelompok yang ingin diperjuangkan. Mereka ingin bisa berkuasa dan bisa mengendalikan pemerintah, sehingga program dari setiap partai tersebut bisa terwujud dan menguntungkan bagi partai politik.

²⁵. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 1—11.

Beberapa literatur memaparkan secara umum fungsi partai politik yaitu sebagai sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, partisipasi politik, pengatur konflik, pembuatan kebijaksanaan, dan untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa.²⁶ Jika dihubungkan dengan persoalan pemilihan umum, maka setiap fungsi berjalan saling melengkapi satu dengan lainnya. Sebelumnya partai politik butuh menjalankan rekrutmen anggota sesuai dengan harapan dan tujuan partai. Kemudian sosialisasi politik terkait dengan info dan pendidikan bagaimana seharusnya seseorang menentukan pilihan politiknya. Dan saat pemilu dijalankan, partai politik memiliki harapan bisa memenangkan kontestasi politik tersebut. Sehingga partai politik dapat menjalankan fungsinya untuk bisa membuat suatu kebijakan sesuai dengan kepentingan yang ingin diperjuangkan.

Pada internal partai politik kecenderungan ada berbagai macam faksi yang berada di dalamnya. Faksi-faksi tersebut adalah wujud dari kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Setiap faksi berjuang untuk bisa menguasai kebijakan, jabatan, dan suara serta memaksimalkan ketiga penguasaan tersebut.²⁷ Faksi-faksi tersebut mempengaruhi strategi partai dan keseluruhan sistem partai. Walaupun bahkan ekstrimnya sampai mereka memutuskan untuk tidak mentaati aturan dari pimpinan partai tersebut. Bentuk tidak mentaati aturannya berupa merusak dukungan dari pemilih ataupun membuat partai baru yang menjadi musuh saat kampanye pemilihan. Maka dari itu dalam partai politik untuk menjaga kesatuannya memerlukan usaha untuk tawar menawar dengan faksi-faksi yang ada beserta dengan setiap konsekwensinya.²⁸

1.5.3 Pemilihan Walikota

Pemilihan Walikota adalah pelaksanaan pemilihan pasangan calon oleh pemilih dengan persebaran wilayah di Kota untuk menjadi Walikota dan Wakil

²⁶. Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, 11—44.

²⁷. Andrea Ceron, *Intra-party Politics and Party System Factional Conflict, Cooperation and Fission within Italian Parties* (Tesis—Universitas Degli Studi Di Milano, Milan, 2011), 30.

²⁸. *Ibid*, 8.

Walikota secara demokratis.²⁹ Pemilih adalah seseorang yang berasal dari Kota tersebut ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimilikinya. Masyarakat kota disebut pemilih ketika memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu berusia minimal 17 tahun. Sehingga pemilihan walikota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surabaya untuk pemilih Surabaya memilih pasangan walikota secara demokratis.

1.5.4 Kekuasaan Politik

Peraihan dan pemertahanan kekuasaan menjadi tujuan dari adanya konflik politik. Makna kekuasaan menurut konsep Robert Dahl adalah bagaimana seseorang dapat mempengaruhi yang selainnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan harapan seseorang tersebut. Sedangkan Ramlan Surbakti menyimpulkan secara umum kekuasaan adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pihak yang lain agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemengaruh. Sedangkan secara sempit, kekuasaan politik adalah kemampuan seseorang penggunaan sumber-sumber pengaruh sehingga proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dapat menguntungkan seorang tersebut.³⁰

Sumber kekuasaan dapat berupa kekayaan, jabatan, keahlian, informasi, sarana kekuasaan fisik, status sosial dan popularitas. Selain itu sumber kekuasaan juga membutuhkan pelengkap yaitu waktu dan keterampilan jika memang diarahkan untuk meraih kekuasaan. Maksudnya adalah bagaimana seseorang menggunakan sumber kekuasaan dengan waktu yang cukup dan keterampilan yang mumpuni.³¹

Penggunaan sumber kekuasaan pada proses politik memerlukan keminatan pada dunia politik. Keminatan bergantung pada pengalamannya pada dunia politik apakah menguntungkan atau justru merugikan untuk memenuhi dorongan kebutuhannya. Seseorang atau suatu kelompok akan menggunakan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi proses politik jika dipandang dapat

²⁹. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016.

³⁰. Ibid, 72—73.

³¹. Ibid, 80—85.

menguntungkan dirinya mendapat kekuasaan politik. Apalagi dalam diri pihak pemilik sumber kekuasaan memiliki harapan keberhasilan tinggi, kapasitas internal dan dukungan eksternal yang cukup untuk bisa mendapatkan kekuasaan.³²

1.5.5 Rekrutmen Politik

Partai politik sangat menentukan pilihan kandidat yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Realitas yang terjadi proses rekrutmen dan seleksi kandidat di dalam partai justru memunculkan calon-calon yang berasal dari luar partai dan pencalonannya pun mengabaikan mekanisme seleksi yang dibuat oleh partai itu sendiri. Kecenderungan partai akan bersikap pragmatis dengan menghitung menang atau kalah. Sehingga akan mempertimbangkan pasangan calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan memiliki kemungkinan tinggi untuk menang.³³

Pada umumnya struktur hirarkis partai politik di Indonesia sangat menentukan keputusan calon yang akan diusung. Struktur partai terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai dengan tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten dan kota atau sampai dengan tingkat ranting. Kedudukan setiap struktur berbeda dalam pengambilan keputusan. Ada partai yang menentukan keputusan akhirnya berada di DPP walaupun ada proses penjaringan dari daerah. Kondisi ini menunjukkan peran dan dominasi pimpinan pusat dari partai politik dalam proses rekrutmen, seleksi dan penentuan kandidat.³⁴

Cross dan Bottomore mengemukakan mengenai rekrutmen politik bahwa dengan mengetahui hal tersebut maka akan menunjukkan lokus dari kekuasaan partai politik yang sebenarnya. Apakah sifatnya menyebar atau oligarkis. Selain itu rekrutmen juga menentukan sirkulasi elit. Pasca rekrutmen akan diketahui

³². Ibid, 87—90.

³³. Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 04, no.01 (2019): 56.

³⁴. Ibid, 56—57.

wajah partai kedepannya di mata public. Dan yang terakhir adalah rekrutmen politik ada di posisi sentra dalam menunjukkan tipe kepartaian.³⁵

Peran penting partai politik dalam pemilihan dikemukakan oleh Barrie Axford bahwa partai politik adalah kendaraan untuk bisa memenangkan pemilihan umum. Delapan fungsi partai politik adalah sebagai berikut sosialisasi dan mobilisasi, menstrukturisasi suara, menyampaikan dan mengagregasi kepentingan, rekrutmen elit dan aktivis, merepresentasi, membangun isu dan kebijakan, bagian yang mengatur pemerintahan, dan legitimasi. Oxford menyatakan bahwa kemenangan kandidat dalam pemilihan itu ditentukan oleh rekrutmen politik.³⁶

Sejarah dalam politik menunjukkan terdapat dua model rekrutmen dalam partai politik di negara modern ataupun berkembang. Model rekrutmen pertama yaitu *descriptive style*, merupakan model rekrutmen yang berdasarkan pada kriteria ketokohan, keuangan, dan kedekatannya dengan pengurus partai. Pada intinya adalah berhubungan dengan ikatan primordial. Sedangkan model rekrutmen kedua yaitu *oriented style*. Model rekrutmen tersebut mendasarkan pada kelayakitan dan kemampuannya memimpin.³⁷

Analisis klasifikasi model rekrutmen politik akan menentukan kualitas demokrasi pada suatu partai politik. Menurut Barbara Geddes terdapat empat model rekrutmen politik. Pertama adalah *partisanship*, rekrutmen berdasarkan loyalitas pada partai, usaha mengumpulkan partisan dan kecenderungan rekrutmen ini kurang menunjukkan kompetensinya. Kedua adalah *meritocratic*, rekrutmen pada kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, pekerja ahli, guru, dsb. Ketiga adalah *compartmentalization*, rekrutmen berdasarkan pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-posisi yang dianggap penting untuk keberhasilan pragmatis. Dan juga pengangkatan

³⁵. Ibid, 57

³⁶. Ibid.

³⁷. Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 04, no.01 (2019): 57—58.

selainnya untuk mendukung jangka pendek dan mengembangkan pengikut yang loyal. Dan yang terakhir adalah *survival*, rekrutmen berdasarkan prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar yang akhirnya jadi cenderung patronase.³⁸

Seleksi calon yang akan diusung akan menentukan arena perebutan kekuasaan internal partai. Maka dari itu metode seleksi calon akan mendefinisikan karakter partai dan perebutan kekuasaan di internalnya. Terdapat empat kriteria dalam prosedur untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon menurut Rahat dan Hazan yaitu selektokrat, pencalonan, desentralisasi, dan voting versus penunjukan. Proses seleksi sebagian besar dikendalikan oleh partai politik bukan oleh pemilih.³⁹

Kemudian menurut Norris dan Lowenduski dalam proses menentukan keputusan ada dua dimensi yaitu bagaimana kekuasaan disebar dan bagaimana formalisasi pembuatan keputusan. Penyebaran kekuasaannya apakah bersifat sentralistik atau sampai juga di regional/lokal. Dan terkait dengan formalisasi pembuatan keputusan terdapat beberapa model yaitu pertama informal-terpusat, menggunakan mekanisme konstitusional tetapi praktiknya adalah patronase kepemimpinan. Sehingga anggota perannya sangat terbatas dan hanya menunjukkan fungsi simbolik saja. Kedua adalah informal-regional, faksi pemimpin melakukan penawaran dengan yang lain untuk menempatkan kandidat favorit diposisi yang terbaik.⁴⁰

Ketiga adalah formal-terpusat, yaitu eksekutif partai pusat memiliki otoritas konstitusional untuk memutuskan calon pemimpinnya. Keempat adalah formal-regional, hampir sama seperti formal terpusat tetapi yang memiliki otoritas adalah eksekutif regional. Dan yang terakhir adalah formal-terlokal, yaitu adanya

³⁸. Ibid, 58.

³⁹. Ibid, 58—59.

⁴⁰. Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 04, no.01 (2019): 59.

pemapanan konstitusional dan panduan nasional dalam rangka menstabilkan proses rekrutmen.⁴¹

Sosok figur kharismatik dalam partai sangat menentukan keputusan strategis dalam partai walaupun tidak selalu berada pada struktur pimpinan tertinggi. Megawati di PDIP, Wiranto di partai Hanura, dan Susilo Bambang Yudhoyono di partai Demokrat, beliau-beliau adalah orang yang selalu terpilih menjadi ketua partai secara aklamasi. Sosok figur tersebut banyak mempengaruhi berbagai pengambilan keputusan internal partai dalam merekomendasikan bakal calon kepala daerah. Walaupun partai memiliki mekanisme pencalonan dan seleksi kandidat hanya akan sia-sia karena keputusan akhir bergantung pada rekomendasi DPP.⁴²

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konflik Politik

Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang saling bertentangan antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Karena perbedaan kepentingan menjadi hal yang lumrah karena setiap individu ataupun kelompok memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan kepentingan tersebut akan berubah menjadi konflik jika titik perbedaannya saling bertentangan atau dianggap merugikan satu dengan lainnya. Konflik yang berhubungan dengan politik adalah karena adanya perbedaan kepentingan politik yang bertentangan antar pihak yang sedang bertikai. Konflik dalam politik merupakan hal yang wajar terjadi. Secara umum tujuan konflik menurut Ramlan Surbakti adalah pihak-pihak berbeda yang berkonflik memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan sesuatu. Dan satu pihak ingin mendapatkan, sedangkan pihak yang lainnya ingin mempertahankan.⁴³ Sedangkan Lili Romli mengutip Maswadi Rauf menjelaskan bahwa terdapat tiga macam konflik politik.

⁴¹. Ibid.

⁴². Ibid, 62.

⁴³. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 199.

Konflik politik karena kekuasaan, kebijakan politik, dan perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik.⁴⁴

Weber juga menjelaskan mengenai keterhubungan antara konflik dan kekuasaan atau politik. Menurut pendapatnya dalam *The Theory of Social and Economic Organization* (1947) menjelaskan bahwa konflik bisa ada dalam setiap wujud stratifikasi. Stratifikasi tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tetap juga status dan *power*. Seseorang ataupun kelompok tertentu ingin memperoleh posisi yang lebih tinggi sehingga melakukan banyak hal untuk memperjuangkannya. Stratifikasi tersebut seakan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi. Sehingga setiap hubungan manusia dipenuhi dengan usaha-usaha untuk bisa mendapatkan posisi tinggi dalam stratifikasi.⁴⁵ Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa seseorang bisa berkonflik untuk sebuah kekuasaan. Hal tersebut didorong karena memang kekuasaan itu pada dasarnya bisa merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Konflik perebutan kekuasaan pastinya berhubungan dengan keinginan untuk meraih dan atau mempertahankan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, seseorang memperjuangkan kepentingan politik berdasarkan pada dua macam motif yaitu motif ekonomi dan motif altruistik. Motif ekonomi menunjukkan bahwa dorongan untuk meraih suatu kekuasaan didasarkan pada kebutuhan memperkaya diri atau untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan motif altruistik menunjukkan dorongan peraihan kekuasaan yang didasarkan murni karena ingin mengabdikan dan melayani masyarakat.⁴⁶

Maurice Duverger memiliki pendapat yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Max Weber. Weber lebih detail menunjukkan perbedaan wujud perilaku dari perbedaan motif dalam usaha meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tipe orang yang masuk dalam dunia politik untuk mengabdikan maka perilakunya akan memperjuangkan nilai-nilai idealisme.

⁴⁴. Romli, "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi," 96.

⁴⁵. Novri Susan, *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis Edisi Ketiga*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019), 27.

⁴⁶. Romli, "Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi," 96—97.

Sedangkan motif yang kedua, perilakunya akan cenderung lebih pragmatis dan oportunis.⁴⁷ Sehingga jika dihubungkan dengan konflik politik maka ada pihak yang bertikai memang karena perbedaan nilai-nilai idealisme dan ada pihak yang bertikai karena ingin mengambil keuntungan materialistis yang lebih besar dan tidak ingin dirugikan.

Penyebab konflik menurut Ramlan Surbakti adalah karena kemajuan horizontal dan vertikal. Kemajuan horizontal berhubungan dengan kemajemukan kultural seperti suku, ras, daerah, dan agama. Kemudian kemajuan horizontal secara sosial adalah adanya perbedaan profesi dan perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti kota dan desa.⁴⁸

Kemajemukan horizontal kultural penyebab konfliknya adalah ada upaya untuk mempertahankan identitas dan karakter dari budaya masing-masing dari ancaman kultur lain. Permasalahan ini belum ada konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama. Sedangkan kemajemukan horizontal sosial, penyebab konfliknya adalah adanya kepentingan yang berbeda bahkan saling bertentangan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.⁴⁹

Selanjutnya maksud dari kemajemukan vertikal adalah adanya polarisasi kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Penyebab konfliknya karena dari kemajemukan vertikal adalah karena adanya distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang tidak adil.⁵⁰

Situasi dalam konflik menurut Paul Conn terdapat dua kondisi yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non-zero-sum conflict*). Situasi menang-kalah adalah situasi yang tidak mungkin terjadi kompromi antar pihak yang berkonflik. Ciri struktur konfliknya adalah tidak ada kerjasama, hasil kompetisi hanya dirasakan oleh pemenang saja, dan

⁴⁷. Ibid, 97.

⁴⁸. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 193—194.

⁴⁹. Ibid, 194.

⁵⁰. Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 194.

yang dipertaruhkan sifatnya adalah prinsipil seperti harga diri, keimanan, masalah hidup dan mati, serta jabatan penting dalam pemerintahan. Sedangkan situasi konflik menang-menang adalah situasi yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk berkompromi dan kerjasama sehingga setiap pihak mendapatkan bagian dari konflik. Yang dipertaruhkan bukan prinsipil tetapi dianggap penting oleh pihak yang terlibat. Ciri struktur konfliknya adalah ada kompromi dan kerjasama, hasil kompetisi dirasakan kedua belah pihak walaupun tidak maksimal.⁵¹

Pemahaman pada suatu konflik perlu digambarkan dengan menggunakan sebuah metode untuk memetakan konflik. Wehr dan Bartos dalam Novri Susan menjelaskan teknik pemetaan konflik. Pertama, penelusuran informasi mengenai konteks dari terjadinya konflik. Kedua, penentuan siapa saja pihak yang sedang berkonflik. Mulai dari pihak utama yang memiliki kepentingan, pihak sekuder yang memiliki kepentingan tidak langsung dari hasil hasil konflik, dan pihak yang menjadi penengah. Ketiga, pemisahan sebab substansi dan akibat pinggiran dari konflik. Keempat, tujuan spesifik pihak berkonflik selama proses konflik. Kelima, pemahaman pada dinamika perkembangan situasi dari tindakan pihak berkonflik. Keenam, menemukan wujud perilaku yang mengarah pada penyelesaian. Dan ketujuh adalah memahami apakah ada aturan yang legal untuk menyelesaikan konflik tersebut.⁵² Pemetaan konflik tersebut meskipun memang mengadopsi dari sosiologi konflik tetapi bisa mempermudah untuk menggambarkan situasi dan dinamika konflik politik yang terjadi.

Konflik politik bisa diselesaikan dengan mekanisme yang disepakati bersama. Hal tersebut mulai dari dialog, musyawarah untuk mencapai mufakat, dialog untuk pengadaan pemungutan suara, dan bisa kombinasinya. Sehingga dari mekanisme tersebut bisa menghasilkan kesepakatan berupa keputusan politik. Wujud kesepakatan dapat berupa kerjasama berbentuk koalisi atau

⁵¹. Ibid, 196—197.

⁵². Susan, *Sosiologi Konflik Teori-Teori dan Analisis Edisi Ketiga*, 73—74.

aliansi dalam proses membuat dan melaksanakan keputusan. Gaetano Mosca mengemukakan bahwa suatu pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan berhasil jika terbentuk koalisi atau kerjasama antara satu atau lebih kekuatan politik.⁵³

1.6.2 Konflik Rekrutmen Politik

Kacung Marijan menyampaikan bahwa pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi cenderung berpotensi konflik. Sehingga untuk menghindari konflik terkadang partai politik akan lebih bersifat sentralistik. Konflik yang terjadi dalam rekrutmen dan seleksi kandidat kepala daerah dapat terjadi secara horizontal ataupun secara vertikal. Keputusan dalam proses pencalonan akan menunjukkan karakter partai apakah desentralisasi ataukah kekuasaan hanya ada pada elit-elit tertentu atau sosok figur tertentu dalam partai. Konflik internal tersebut akan menjadikan partai politik sebagai arena pertarungan orang-orang yang ingin menduduki jabatan politik.⁵⁴

Walaupun sebenarnya keputusan untuk bersifat sentralistik juga akan berpotensi menimbulkan konflik vertikal di internal partai politik. Karena partai politik memiliki AD/ART yang disusun menggunakan prinsip demokrasi. Sehingga seharusnya memberikan hak yang sama kepada anggotanya untuk berbicara, memberikan suara, memilih dan dipilih, dan hak membela diri. Sedangkan kewenangan DPP adalah pengambilan keputusan di tingkat nasional. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota. Tetapi yang terjadi justru banyak partai politik yang hanya dikuasai oleh beberapa elit pimpinannya atau bahkan juga satu sosok figur kuat yaitu ketua umum partai.

⁵³. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 24.

⁵⁴. Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 04, no.01 (2019): 61.

Sehingga menjadi kewajiban anggota untuk mengikuti dan melaksanakan keputusannya.⁵⁵

Faktor kuatnya pengaruh ketua umum partai dalam pengambilan keputusan adalah karena orientasi politik internal partai politik yang masih saja mengutamakan figur sentral sebagai sosok yang kharismatik di partai sehingga membuat sirkulasi kepemimpinan partai rendah. Biasanya kedudukan dan jabatan ketua umum partai melekat pada figur yang menjadi pendiri atau penggagas suatu partai politik. Bahkan sampai akhirnya pengaruh ketua umum jauh lebih melebihi kekuasaan dewan pembina. Sehingga permasalahan itulah yang menyebabkan partai sulit menerapkan prinsip demokrasi. Seperti contohnya adalah persoalan keputusan pencalonan kepala daerah, seharusnya itu adalah urusan daerah. Tetapi beberapa partai politik justru menjadikannya urusan DPP. Sehingga menimbulkan konflik antara DPP dengan DPW atau DPC karena adanya perbedaan pilihan. Proses penjangkaran dan seleksi dilakukan dari ranting, DPC dan DPW. Tetapi semua hasilnya ditentukan oleh DPP khususnya ketua umum. Dan yang terjadi memang antara pilihan DPP dan ketua umum tidak selamanya sesuai dengan pilihan daerah. Bahkan hasil rekomendasinya adalah calon yang sama sekali tidak mengikuti proses penjangkaran dan seleksi di internal partai.⁵⁶

Ada beberapa faktor pendorong adanya dominasi pimpinan pusat partai dalam penentuan calon kepala daerah. Faktor pertama adalah akibat dari pembentukan partai bersifat *top down*. Ketergantungan pada figur membuat partai bersangkutan seolah-olah membiarkan berada di bawah dominasi personal figur. Padahal salah satu aspek penting menurut Mainwaring dalam standarisasi partai yang terinstitusionalisasi dengan baik adalah ketiadaan dominasi dari seorang figur tertentu. Sedangkan faktor yang kedua adalah karena partai-partai di Indonesia belum terinstitusionalisasi. Standarnya suatu partai yang terinstitusionalisasi dengan baik adalah adanya kompetisi partai yang lebih stabil,

⁵⁵. Ibid, 62.

⁵⁶. Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 04, no.01 (2019): 62—63.

memiliki akar yang kuat dalam masyarakat dengan ideologi yang konsisten, pengakuan mengenai pentingnya partai politik, struktur internal, prosedur dan rutinitas yang jelas dengan pergantian kepemimpinan dalam tubuh partai tanpa adanya konflik. Faktor ketiga adalah karena partai politik belum terlembagakan dengan baik. Karena seharusnya anggota organisasi baik itu berada di dalam struktur ataupun di luar haruslah menyadari dan menempatkan partai sebagai institusi yang netral dari kepentingan personal walaupun memegang jabatan yang paling penting. Faktor yang keempat adalah karena pragmatisme, sehingga partai hanya fokus hitung-hitungan menang kalah saja dalam menentukan calon kepala daerah.⁵⁷

Pada akhirnya dampak dari dominasi ketua umum akan menyebabkan mudahnya pemberian kepercayaan kepada calon kepala daerah dari non kader. Hal tersebut menyebabkan tidak berkembangnya demokrasi di internal partai politik. Para kader akan merasa tidak bermakna bahkan kedepannya akan enggan untuk mengurus partai. Makanya sangat wajar terjadi jika perekrutan calon kepala daerah dari non kader ketika calon tersebut terpilih, seseorang itu tidak memiliki kedekatan emosional dengan partai dan partai merasa ditinggalkan.⁵⁸ Kondisi inilah yang akhirnya membuat para kader yang sudah lama berada di partai menyampaikan tuntutan mereka pada pemimpin agar mendengarkan aspirasi dari anggota yang ada di bawah.

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian

1.7.1 Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti, dengan harapan untuk bisa mengetahui apa yang terjadi dibalik dari suatu fenomena tersebut. Penelitian fokusnya adalah untuk memahami

⁵⁷. Siti Witianti dan Hendra, "Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia," *Jurnal Wacana Politik* 04, no.01 (2019): 63—64.

⁵⁸. Ibid, 65—66.

keunikan dalam konteks dan interaksi yang terjadi.⁵⁹ Sehingga peneliti dalam penelitian ini ingin mengetahui secara mendetail terkait dengan konflik politik yang terjadi dalam internal partai politik sebelum penentuan keputusan calon walikota yang akan diusung dalam pemilihan umum walikota Surabaya tahun 2015. Apa yang terjadi dibaliknya (sumber konflik), dinamika konfliknya, dan deskripsi pandangan dan sikap terkait dengan konflik yang terjadi.

Data dari penelitian yang didapatkan berupa deskripsi kata-kata ucapan, tulisan-tulisan, dokumen-dokumen pribadi dan dokumen-dokumen selainnya. Ciri khas dalam suatu penelitian kualitatif bukan untuk mengeneralisir atau untuk menguji hipotesis. Tetapi lebih deskriptif mengungkap suatu fenomena dengan penjelasan yang sesuai dengan apa yang terjadi dengan menggunakan kata-kata deskriptif.

1.7.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam suatu penelitian ini menggunakan purposive sampling. Yaitu pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan yang dianggap terlibat sebagai pihak yang bertikai. Spesifik subyeknya adalah pemegang struktur DPC PDIP Surabaya pada tahun 2015. Pihak tersebut adalah sebagai berikut

1. Adi Sutarwijono
2. Khusnul Khotimah
3. Budi Laksono

Pemilihan Adi Sutarwijono sebagai subyek penelitian karena beliau ikut serta secara langsung dalam dinamika yang terjadi saat proses penentuan bakal calon pasangan di DPC PDIP Surabaya. Apalagi beliau adalah wakil ketua DPC PDIP Surabaya. Dan juga beliau dipercaya oleh DPP PDIP untuk menjadi ketua DPC PDIP Surabaya menggantikan Wisnu Sakti Buana. Sehingga beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan DPP dan mengetahui bagaimana dinamika konflik di internal DPC PDIP Surabaya.

⁵⁹. S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 54—55.

Selanjutnya pemilihan subyek penelitian Khusnusl Khotimah karena beliau adalah salah satu kader PDI Perjuangan yang sudah berada di PDIP sebelum tahun 2015. Pemilihan kader tersebut dalam rangka ingin mengetahui dinamika yang terjadi di dalam kader secara umum.

Dan yang terakhir subyek penelitiannya adalah Budi Laksono karena beliau adalah bagian dari inti kepengurusan DPC PDIP sebagai Bendahara di tahun 2015. Sehingga beliau dianggap mengetahui bagaimana dinamika yang terjadi di dalam DPC PDIP Surabaya berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Selain itu juga dibutuhkan informasi dari kader DPC PDIP yang mengetahui informasi mengenai konflik tersebut. Informasi dari ini akan memperkaya data yang kemungkinan ada yang tidak disampaikan oleh pihak yang bertikai. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik purposive. Teknik tersebut pada intinya mengambil sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangannya salah satunya adalah karena dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk menelusuri obyek atau situasi dalam penelitian.⁶⁰ Sehingga jika dikontekskan dengan penelitian maka langsung menysasar orang-orang tertentu di DPC PDIP yang menjadi sumber informasi mengenai rumusan masalah untuk menjelaskan mengenai konflik internal DPC PDIP dalam menentukan bakal calon walikota di Surabaya tahun 2015.

1.7.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah Surabaya. Karena memang penelitian berfokus pada konflik internal DPC PDIP Surabaya. Kantor DPC PDIP Surabaya terletak di Jalan Setail No.8, Darmo, Kecamatan Wonokromo.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diupayakan untuk didapatkan adalah data berupa alasan-alasan ataupun apa yang ada dibalik suatu peristiwa konflik, maka dari itu butuh

⁶⁰. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53—54.

mengetahui data dari orang yang terlibat dalam konflik tersebut. Sehingga untuk bisa menggali data dapat menggunakan wawancara mendalam.

Wawancara yang mendalam pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara secara individual dengan orang yang memberi data ataupun informasi pada peneliti. Pemilihan orang tersebut berdasarkan kepada kriteria kesesuaian menjadi informan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah. Selama proses wawancara memang akan ada daftar pertanyaan sesuai dengan topik. Tetapi wawancara bisa berkembang menyesuaikan dengan tanggapan narasumber.⁶¹

Orang yang diwawancarai harus juga memenuhi kriteria untuk bisa menjawab permasalahan penelitian. Peneliti dalam melakukan wawancara perlu untuk membuat informan nyaman, dengan tidak mengesankan formal, tetapi peneliti mengarahkan agar informan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ilmu politik adalah deskripsi yang menggunakan prosedur menentukan, mengklasifikasikan, dan mengkategorikan hasil data temuan. Deskripsi tersebut nantinya akan menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga peneliti bisa menetapkan dan menarik kesimpulan dari hasil penggambaran tersebut.⁶²

Cara pendeskripsian juga harus bersifat sistematis dan tepat. Hal-hal yang dideskripsikan haruslah relevan dengan rumusan masalah penelitian. Selain itu peneliti juga perlu membuat prediksi dari hubungan antar variabel. Prediksi nantinya akan menjadi hipotesis sementara dengan didasarkan pada teori dan kumpulan konsep yang berhubungan dalam menjelaskan kumpulan data.⁶³

Prose dalam interpretasi data juga bisa dilakukan sejak peneliti turun di lapangan. Interpretasi merupakan kegiatan untuk bisa menentukan kesatuan makna dari hasil pencarian data berdasarkan pada rumusan masalah. Perbaikan

⁶¹. S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, 68.

⁶². Ibid, 82.

⁶³. Ibid, 83.

dan pemeriksaan ulang data dapat dilakukan secara sistematis selama proses interpretasi. Tetapi tetap harus memperhatikan pemahaman asli dari narasumber dan situasi yang ada.⁶⁴

Tahapan dalam interpretasi datanya ada memperhatikan pertanyaan penelitian dan data yang sudah dikumpulkan. Kemudian melakukan interpretasi untuk bisa mendapatkan keselarasan dan kelogisan makna yang mendasari keseluruhan data. Dan terakhir pemahaman tersebut diubah dalam konsep yang lebih luas, generalisasi, atau teori.⁶⁵

Sehingga jika dikontekskan dalam penelitian ini maka akan ditentukan, diklasifikasi subyek penelitian dan dikategorikan hasil temuan. Ketiga hal tersebut dilakukan sejalan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Kemudian data mengenai sumber konflik, dinamika konflik, dan pandangan/sikap dari pihak yang berkonflik akan dideskripsikan. Pendeskripsian berupa penggambaran yang sistematis dan sesuai dengan data yang relevan dengan rumusan masalah. Proses penginterpretasian data juga akan dilakukan dengan teliti dan tidak menghilangkan pemahaman asli dari narasumber. Kemudian dalam proses pendeskripsian juga akan dituliskan prediksi dan dihubungkan dalam teori atau konsep yang berkaitan. Dan terakhir dilakukan penyimpulan dari hasil pendeskripsian tersebut.

⁶⁴. Ibid, 85—86.

⁶⁵ S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, 86.